

**EKSISTENSI ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DALAM
PARTAI POLITIK DI KECAMATAN SUKAWATI**



ARTIKEL

OLEH

I WAYAN PUTRA WIDIA SUKMA
0814041007

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2013**

EKSISTENSI ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DALAM PARTAI POLITIK DI KECAMATAN SUKAWATI

Oleh:

I Wayan Putra Widia Sukma
Drs. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si
I Nengah Suastika, S.Pd, M.Pd

Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Email: goesstar@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan pada lingkungan kecamatan sukawati yang bertujuan untuk dapat mengetahui (1) sejauhmana keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam partai politik di kecamatan sukawati (2) strategi yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk masuk ke partai politik di kecamatan sukawati (3) kendala yang dihadapi oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam keterlibatannya dengan partai politik di kecamatan sukawati. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah: (a) anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) (b) anggota partai politik (c) tokoh masyarakat dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris dan dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan pencatatan dokumen. Serta dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang teramati dengan metode pengambilan sampel (*purposive sampling*). Hasil penelitian ini adalah (1) keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam partai politik sejauh ini terlihat dalam (a) memberikan pengawalan dalam kegiatan partai politik (b) turut serta hadir dalam undangan rapat partai politik (c) memberikan dan mencarikan dukungan bagi anggota partai politik (d) menjalin bentuk kerjasama atau kesepakatan antara anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan anggota partai politik (e) pemasangan atribut oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun partai politik. (2) Strategi yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk masuk ke partai politik yaitu (a) karena adanya kedekatan dari salah seorang anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan anggota partai yang mengarah pada seluruh anggota organisasi kemasyarakatan (ormas). (3) kendala yang dihadapi oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam keterlibatannya dengan partai politik yaitu (a) susah nya anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menolak ajakan dari anggota partai politik tersebut (b) sulitnya organisasi kemasyarakatan (ormas) menyepakati kesepakatan kerja sama (c) ruang gerak organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi sangat terbatas (d) sulitnya anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) kami dalam lingkungan masyarakat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Kata-kata kunci : keberadaan dan aktifitas organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam partai politik.

ABSTRACT

The research was conducted in the districts Sukawati aimed to determine (1) the extent of the involvement of community-based organizations (CBOs) in the party in the district Sukawati (2) the strategy undertaken by community organizations (CBOs) to enter the political parties in the district Sukawati (3) constraints faced by community organizations (CBOs) in engagement with the political parties in the district Sukawati. The subject in this study are : (a) members of civil society organizations (CBOs) (b) members of a political party (c) community leaders and the public. This study used qualitative research methods deskripif and data collection, the authors use observation techniques, interviewing and recording dokumen. Serta in this qualitative descriptive study, researchers used qualitative data analysis, which is a research procedure that produces descriptive data in the form of words written or spoken of the people and the behavior observed by the sampling method (sampling purfursip). The results of this study were (1) the involvement of community-based organizations (CBOs) in the party so far seen in (a) providing escorts in the activities of political parties (b) participate in the meeting invitation attend political party (c) provide and find support for party members political (d) establish forms of cooperation or agreement between members of civil society organizations (CBOs) with members of political parties (e) erection attributes by community organizations (CBOs) and political parties. (2) Strategies undertaken by community organizations (CBOs) to enter into a political party that is (a) because of the proximity of one of the members of civil society organizations (CBOs) with members of the party that leads to all members of the community-based organizations (CBOs). (3) the constraints faced by community-based organizations (CBOs) in engagement with the political party that is (a) hard members of civil society organizations (CBOs) to refuse an invitation from members of the political party (b) the difficulty of civil society organizations (CBOs) to agree on a cooperative agreement (c) the space for civil society organizations (CBOs) to be very limited (d) the difficulty of members of civil society organizations (CBOs) in our society gain the trust of the public.

Key words: The existence and activities of civil society organizations (CBOs) in the party.

1. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai politik itu sendiri memang berarti cerdik, dan bijaksana yang dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengertikan sebagai suatu

cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan. Dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan, dan pada akhirnya kekuasaan. Tetapi politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi konsensus nasional, serta kemudian kekuatan masa rakyat.

Oleh karena itu, politik pada hakikatnya adalah bagian dari pada umat manusia. Tidak dapat dipisahkan dari keterpaduannya dengan berbagai aspek kehidupannya. Bukan hanya kehidupan menyangkut salah satu aspek dalam kehidupan umat manusia. Baik secara sadar maupun tidak sadar, tiap manusia adalah melakukan hal-hal yang bersifat politik serta berada dalam lingkungan yang disebut "sistem politik". Dalam hal ini bahkan, pada masa lampau ketika bentuk negara belum dikenal, lingkungan masyarakat adalah merupakan "sistem politik" (Rudy, 2007:2).

Menurut Sumantri (dalam Syafiie, 2002:2). Sistem adalah "Sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan". Jadi dapat dikatakan sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian, yang kait mengkait satu sama lain, bagian atau anak cabang dari suatu system, menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai bagian yang terkecil, rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan.

Sistem tersebut dapat berperan dalam suatu kelompok atau organisasi yang dibangun oleh masyarakat dalam menunjukkan sikap politik di masyarakat, karena hal tersebut dapat difungsikan sebagai suatu kesatuan yang berkaitan antara satu dengan yang lain sehingga mampu menjangkau wilayah atau masyarakat lainnya secara menyeluruh.

Dapat dikatakan kondisi bangsa ini, energinya terkuras oleh masalah politik yang tiada henti-hentinya. Paradoksnya, politik yang semestinya bermuara pada perlombaan untuk membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara namun yang

terjadi hanyalah perebutan ekonomi dan kekuasaan serta kepentingan elit politik segolongan dan partai tertentu saja.

Saat ini terlihat pula hubungan organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan partai politik, hubungannya di negeri ini seperti Simbiosis Parasitisme (satu untung-yang lain dirugikan). Bagi partai politik, menjelang pemilu, organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi lahan perebutan untuk mendapatkan dukungan politik. Bahkan partai politik sering membuat organisasi kemasyarakatan (ormas) baru, jika malu-malu minta dukungan dari organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu. Sedangkan partai politiknya atau anggota serta tokohnya berselingkuh dengan menyusupkan agendanya ke dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) melalui pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Sesungguhnya organisasi kemasyarakatan (ormas) harus mampu untuk mengkonsolidasikan diri sehingga terbebas dari kepentingan politik tertentu. Sehingga organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki daya tawar yang tinggi terhadap partai politik. Dan pada akhirnya diharapkan bagi partai politik ikut memperjuangkan visi dan misi organisasi kemasyarakatan dalam kancah legislatif maupun eksekutif (<http://uungmashuri.blogspot.com>)

Keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada dan tersebar di Kecamatan Sukawati di pandang sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan menunjukkan semangat mempersatukan kelompok-kelompok masyarakat. Kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan beberapa anggota partai politik, merupakan aktifitas yang dinilai keliru atau bahkan salah oleh beberapa tokoh dan masyarakat. Dengan lemahnya sistem yang dibangun dalam menjalankan organisasi kemasyarakatan (ormas) maka hal tersebut sangat mudah untuk dipengaruhi oleh beberapa anggota partai politik agar anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) diikut sertakan untuk berpolitik praktis

Untuk itu dalam pergerakan organisasi kemasyarakatan (ormas) telah diatur dalam UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas). Akan tetapi sampai saat ini dari UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut tidak dapat atau belum dapat dijalankan dengan baik oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada, serta masih

perlu dilakukan pembenahan terhadap UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas).

Dengan adanya undang-undang yang mengatur pergerakan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik, sudah pasti di tegaskan bahwa anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) harus menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan undang-undang yang telah mengaturnya masing-masing. Dengan keadaan yang terjadi di lapangan sekarang ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan bagi penulis yaitu salah satunya sejauh mana keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan partai politik di kecamatan Sukawati dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) ke partai politik serta kendala apa yang dihadapi oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam partai politik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan empiris. Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena atau gejala yang terjadi. Pengertian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulis atau lisan dari perilaku yang diamati.

Burhan Bungin (2005:102) menerangkan bahwa lokasi penelitian adalah wilayah desa yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Gianyar, yaitu kecamatan Sukawati. Dan dalam penelitian ini, metode pengambilan sampelnya (*purposive sampling*). Yang terdiri dari anggota organisasi kemasyarakatan (ormas), anggota atau pengurus partai politik, tokoh masyarakat di kecamatan sukawati dan masyarakat di kecamatan Sukawati.

Adapun alat pengumpulan data yang penulis gunakan adalah pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman pencatatan dokumen. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan analisis data secara kualitatif, untuk itu teknik yang digunakan tanpa menggunakan alat bantu rumus statistik.

Oleh karena analisa dari penelitian kualitatif tidak mendasarkan interpretasi datanya pada perhitungan-perhitungan seperti analisa data penelitian kuantitatif, maka analisa data terletak pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan

data, fakta, dokumentasi dan informasi yang diperoleh oleh peneliti itu sendiri dari penelitian yang dilaksanakannya (<http://repository.usu.ac.id>).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Sejauhmana Keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Dalam Partai Politik Di Kecamatan Sukawati.

Untuk saat ini banyak opini yang menyatakan bahwa kedekatan organisasi kemasyarakatan (ormas) memang terlihat ada dengan partai politik tertentu. Kedekatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan salah satu partai politik tersebut juga di karenakan beberapa dari anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut ikut di dalam partai politik tersebut. Keterlibatan antara organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan partai politik tersebut baru terlihat hanya dalam bentuk kegiatan partai politik yang dilaksanakan secara langsung dengan mengundang anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut dalam kegiatan partai politik dengan menggunakan seragam organisasi kemasyarakatannya (ormas).

Adapun hal yang melatar belakangi terjadinya bentuk keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan partai politik karena adanya dorongan dan dukungan serta bantuan yang di berikan oleh salah satu anggota partai politik tersebut kepada organisasi kemasyarakatan (ormas), sehingga menimbulkan ketertarikan untuk terlibat dalam kegiatan politik terutama pada salah satu partai politik yang memberikan perhatian kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut. Dalam hal tersebut tentunya organisasi kemasyarakatan (ormas) lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat sosial kepada masyarakat dari pada bersifat politik, akan tetapi jika bersifat politik maka kami bisa membagi diri antara yang mau atau tidak, walaupun atribut organisasi kemasyarakatan (ormas) masih digunakan sebagai bentuk identitas anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) turut serta dalam kegiatan partai politik.

3.1.2 Strategi Yang Di Lakukan Oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Ke Partai Politik.

Dalam catatan organisasi kemasyarakatan (ormas) memang ada tokoh-tokoh dalam partai politik tertentu yang ikut serta kedalam organisasi kemasyarakatan (ormas) dan kedudukan mereka adalah sebagai penasehat. Dengan maksud memberikan dorongan serta figur kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) serta memiliki kekuatan untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) dan keterterikan bagi masyarakat yang ingin turut serta bergabung kedalam organisasi kemasyarakatan (ormas) sekaligus secara tidak langsung keberadaan aktifitas organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi dekat dalam partai politik yang ada melalui tokoh-tokoh yang di tempatkan sebagai penasehat dalam organisasi kemasyarakatan (ormas).

Tidak hanya anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) saja yang dekat atau didekati oleh anggota partai politik, akan tetapi ada pula beberapa anggota partai politik yang ikut bergabung atau hanya dekat sebatas mencari teman dan menjalin kedekatan dengan anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) kami, yang pada nantinya memang akan terlihat kedekatan politik. Kedekatan seperti itu biasanya dimanfaatkan sebagai bentuk pengerahan masa atau dukungan untuk meramaikan, mengawal dan sedikit tidaknya bisa memberikan dukungan dan kontribusi kepada salah seorang anggota partai politik atau mungkin kepada partainya ketika ada kegiatan partai politik yang di selenggarakan.

Didalam organisasi kemasyarakatan (ormas) pada umumnya sudah pasti memiliki cara atau strategi yang dapat digunakan serta diterapkan dalam membangun dan mengembangkan struktur organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dipimpinnya bahkan didalam menunjukkan keberadaannya serta menunjukkan aktifitasnya juga harus memiliki dan menggunakan suatu strategi termasuk didalamnya adalah strategi politik. Sesungguhnya kami tidak menginginkan untuk masuk ke ranah atau ruang partai politik tertentu karena kami berjalan masing-masing dan kami juga bukan bagian dari partai politik atau yang disebut sebagai sayap partai. Keadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) kami memang terlihat adanya bentuk-bentuk kedekatan dengan salah

satu partai politik, namun bukan berarti kami bekerja sepenuhnya untuk partai politik tersebut.

Pastinya kami tidak memiliki suatu cara atau strategi politik khusus yang kami terapkan untuk masuk ke partai politik, dapat di sampaikan bahwa beberapa dari anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) kami yang mungkin bergerak secara pribadi menggunakan suatu cara dan usaha-usaha tertentu yang mengarahkan agar sebagian anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) lainnya untuk ikut serta masuk ke salah satu partai politik yang diinginkan. Tetapi ada maksud dan tujuan yang memang di harapkan setelah kami bisa masuk ke dalam ruang politik itupun di dorong oleh salah satu anggota partai politik yang memerlukan tenaga kami dalam partainya.

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi Oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dalam Keterlibatannya Dengan Partai Politik.

Sedangkan kendala organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kami hadapi dalam kedekatannya dengan partai politik adalah (1) Susahnya anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) kami menolak ajakan untuk ikut serta dalam kegiatan partai politik karena melihat keuntungan yang di peroleh untuk keberadaan dan aktifitas organisasi kemasyarakatan (ormas) (2) Sulitnya anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) kami menyepakati bentuk kesepakatan kerja sama dengan partai politik dikarenakan atas sulitnya membangun kesepakatan yang bisa sama-sama mendukung kususny bagi keberadaan dan aktifitas organisasi kemasyarakatan (ormas) (3) Ruang gerak anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam menyampaikan sesuatu dan lain hal terlihat menjadi sangat terbatas karena anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) hanya difungsikan sebagai dukungan dan bentuk pengamanan atau pengawasan saja dalam partai politik tersebut.

Dan hal lainnya yang susah kami dapatkan adalah bentuk kepercayaan dari masyarakat terhadap keberadaan dan aktifitas organisasi kemasyarakatan (ormas) kami yang mungkin sudah dinilai sebagai bentuk politik oleh masyarakat.

3.2 Pembahasan

Lahirnya organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia yang memberikan ruang bebas dan terbuka untuk masyarakatnya dalam berkumpul bersama, hal tersebut dikarenakan mulai terbentuknya kelompok-kelompok yang berkepentingan dan kemudian diatur lebih jelasnya kedalam UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas). Dalam sejarah partai politik, masyarakat terlebih dulu tergabung dalam kelompok-kelompok yang telah memiliki nama atau identitas tertentu dan kemudian dengan berbagai bentuk dukungan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu serta didukung pula oleh kemampuan, kekuasaan dan kepemimpinan yang baik atau mumpuni maka dibentuklah partai politik yang dapat dikatakan lebih memiliki ruang bebas dan terbuka dalam mengatur pemerintahan jika dibandingkan dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada.

Sesungguhnya untuk kegiatan seseorang dalam partai politik untuk merebut dukungan rakyat haruslah bisa menunjukkan sikap atau bentuk partisipasi politik dalam lingkungan masyarakat seperti yang dijelaskan dalam fungsi partai politik salah satunya (Budiardjo, 2001: 163): yakni partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Hal seperti sosialisasi politik lah yang harus bisa di laksanakan oleh anggota partai politik dalam kegiatan-kegiatan tertentu untuk membangun budaya politik yang baik di masyarakat sehingga besar kemungkinan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik akan tumbuh secara perlahan dan pasti. Sedangkan dalam organisasi kemasyarakatan dijelaskan juga mengenai fungsi organisasi kemasyarakatan (ormas) salah satunya dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yakni: sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi.

Saat ini untuk keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah memiliki izin dan diakui keberadaannya di kabupaten Gianyar pada umumnya dan di kecamatan Sukawati khususnya, kini sedang mengalami pasang surut seperti halnya yang dialami oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) Baladika Bali salah satunya dan mungkin beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas)

lainnya, pasang surutnya organisasi kemasyarakatan (ormas) baladika bali dan mungkin organisasi kemasyarakatan (ormas) lainnya di kecamatan sukawati tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dialaminya dari permasalahan tentang isu kekerasan anatar organisasi kemasyarakatan (ormas) hingga permasalahan politik yaitu adanya bentuk keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam partai politik. keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) juga bisa sebagai tenaga pendukung dari pada anggota partai politik atau partai politik itu sendiri dan keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) juga bisa dikatakan sebagai tenaga tambahan bagi partai politik dan anggota partai politik. Melihat keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) di kecamatan sukawati yang mengalami pasang surut, hal tersebut juga di karenakan lemahnya sistem yang di bangun dan minimnya strategi yang dijalankan untuk membangun struktur kepengurusan di beberapa desa yang ada, khususnya di kecamatan sukawati. Akan tetapi, meskipun struktur kepengurusan tidak terbentuk di semua desa yang ada di kecamatan akan tetapi atribut organisasi kemasyarakatan (ormas) mereka, tetap dapat terpajang dan terpasang dengan jelas di pinggir-pinggir jalan untuk menunjukkan keberadaannya. Dengan kondisi organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti ini biasanya akan menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi beberapa anggota partai politik yang bisa memanfaatkan keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut untuk berperan dan turut serta dalam membantu anggota partai politik untuk memperoleh dukungannya.

Pada aktifitas organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan partai politik di kecamatan sukawati memang tidak terlihat secara terus menerus, akan tetapi pergerakannya selalu dapat diamati dengan kegiatan yang dilakukan bersama partai politik atau pihak-pihak tertentu yang memerlukan tenaga organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut, baik dalam kegiatan sosial, kegiatan yang bersifat pribadi maupun kegiatan dalam hal politik. Usaha organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menjadi organisasi yang independen atau organisasi yang tidak berpihak kepada partai politik manapun terlihat sangat sulit, kesulitan tersebut terlihat karena terkendala oleh sikap-sikap anggota partai politik yang selalu melakukan pendekatan dengan berbagai macam

strategi yang dijalankan untuk bisa membawa organisasi kemasyarakatan (ormas) masuk kedalam kegiatan atau aktifitas partai politik. Dan dengan lemahnya sistem yang dibangun dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut mengakibatkan mudahnya strategi yang di lancarkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memasukan strategi politiknya kepada anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa garis besar sebagai suatu bentuk kesimpulan dan adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dewasa ini organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat dikatakan sebagai perusahaan atau usaha yang menjanjikan khususnya bagi anggota partai politik atau partainya untuk memperoleh suatu dukungan dan membantu aktifitas partai politik meskipun organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut bukanlah sayap dari partai politik.
2. Aktifitasnya organisasi kemasyarakatan (ormas) sudah menunjukkan beberapa kegiatan yang mengarah pada kegiatan sosial dan melibatkan beberapa anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada, akan tetapi aktifitas lainnya masih terlihatnya organisasi kemasyarakatan (ormas) ikut serta dalam kegiatan partai politik yang membuat keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) semakin tidak di perhatikan oleh masyarakat sehingga mulai terlihatnya pasang surutnya aktifitas organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kegiatan sosial.
3. Kurangnya bentuk kesadaran dari anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk melakukan bentuk sosialisasi kepada masyarakat justru menjadikan organisasi kemasyarakatan (ormas) hanyalah sebagai tempat usaha yang memberikan peluang dan kesempatan bagi pihak-pihak terkait yang memerlukan jasa keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seperti dalam hal politik, dimana keberadaan organisasi

kemasyarakatan (ormas) menjadi kendaraan bagi anggota partai politik.

4. Kesempatan untuk berkumpul bersama haruslah dapat dimanfaatkan dengan baik dan sejalan dengan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menunjukkan bentuk partisipasinya kepada masyarakat. Dan tidak menunjukkan bentuk lainnya yang mengarahkan masyarakat umum kedalam berpolitik praktis bahkan jika organisasi kemasyarakatan (ormas) hanya di jadikan sebagai jasa tertentu terlebih dalam hal politik yang hanya menguntungkan perseorangan

4.2 Saran-Saran

Organisasi kemasyarakatan (ormas) sesungguhnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan jauh berbeda dengan partai politik yang memiliki berbagai macam tekanan politik. Namun antara organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan partai politik memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan dan mewujudkan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) dan pada politik yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Untuk itu, baik organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun partai politik harus bisa dan mematuhi serta menjalankan amanat dari aturan masing-masing agar tercipta dan terwujudnya budaya sosial dan politik yang baik dan seimbang.

Khususnya pada organisasi kemasyarakatan (ormas) harus berupaya menentukan suatu sikap untuk berani menolak ajakan terlibat dalam kegiatan partai politik mapun berupaya untuk menawarkan diri untuk turut serta mengambil bagian dan kegiatan politik dengan mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas). Jika keterlibatan ini terus dibiarkan begitu saja dan terus ditanggapi maka organisasi kemasyarakatan (ormas) akan di pandang sebagai kekuatan politik dan bukan lagi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengedepankan nilai sosial kemasyarakatan.

Jika anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) bisa mempelajari dan memperdalam pemahaman terhadap UU No 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tidak hanya melihat AD/ ART yang dimiliki maka secara sederhana pemikiran anggota organisasi kemasyarakatan sedikit demi sedikit namun pasti akan dapat di kuatkan dengan mewujudkan tindakan sosial dan bukan tindakan politik.

Anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) boleh menentukan pilihannya dalam politik namun bukan berarti dapat atau turut serta terlibat dalam kegiatan partai politik serta mendukung kegiatan partai politik, justru yang terlihat adalah organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi jasa pelayanan bagi partai politik yang memerlukan tenaga dan dukungan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Prof Miriam. 2001. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rudy, May. 2007. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Syaffie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Cetakan Pertama 2011. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- <http://ditpolkom.bappenas.go.id>, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. (diakses pada tanggal 05/05/2012 pukul 23:03).
- <http://repository.usu.ac.id>, *Metodologi penelitian*. (diakses pada tanggal 02/06/2012 pukul 23:19 Wita).
- <http://uungmashuri.blogspot.com>, Uung Mashuri. *Pendidikan politik*. (diakses pada tanggal 02/06/2012 pukul 11:23 Wita).